



Peran Kesetaraan Gender Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Hunian Dan Kualitas Hidup Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Ananda Nur Kholifah¹, Marseto², Renny Oktafia³

^{1,2,3} Ekonomi Pembangunan, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya

ABSTRAK: Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji bagaimana peran kesetaraan gender dalam upaya peningkatan kualitas hunian dan kualitas hidup dengan Program Bantuan Perumahan Swadaya (BSPS). Analisis ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi di Desa Jombok Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Upaya peningkatan kualitas hunian dan kualitas hidup divalidasi dengan melihat kondisi rumah sebelum dan sesudah pendampingan program BSPS. Dari hasil kajian diperoleh bahwa peran kesetaraan gender dalam peningkatan kualitas rumah dan taraf hidup berjalan cukup baik dan mampu mencapai keberhasilan. Pelaksanaan Program Bantuan Perumahan Swadaya (BSPS) berhasil menerapkan aspek-aspek kesetaraan gender antara lain: Akses, manfaat, kontrol dan partisipasi. Terpenuhinya keempat aspek tersebut menjadi tanda akan keberhasilan pelaksanaan kesetaraan gender dalam operasional BSPS di Kabupaten Trenggalek.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender; Program BSPS; Kemiskinan.

ABSTRACT: This study aims to examine the role of gender mainstreaming in efforts to improve the quality of housing and quality of life with the Self-Help Housing Assistance Program (BSPS). This analysis uses qualitative research methods of observation, interviews, literature studies, and documentation in Jombok Village, Pule District, and Trenggalek Regency. Efforts to improve the quality of housing and quality of life were validated by looking at the condition of the house before and after the BSPS program's assistance. From the results of the study, it was found that the role of gender mainstreaming in improving the quality of housing and living standards was running quite well and was able to achieve success. The implementation of the Self-Help Housing Assistance Program (BSPS) has successfully implemented aspects of gender equality, including Access, benefits, control, and participation. The fulfillment of these four aspects is a sign of the successful implementation of gender mainstreaming in BSPS operations in Trenggalek Regency.

Keywords: Gender Mainstreaming; BSPS Program; Poverty.

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan umumnya lebih tinggi pada keluarga yang dipimpin oleh perempuan dibandingkan dengan rumah tangga biasa (Nanga, et al., 2018). kondisi ini dikarenakan sedikitnya akses pendidikan serta pekerjaan pada perempuan, terutama mereka yang bertanggung jawab atas rumah tangga. Keadaan ini didukung (Umi Arifah 2018) bahwa kemiskinan tidak semata-mata diukur dari pendapatan, namun mencakup kerentangan serta kerawanan individu ataupun kelompok orang, baik laki-laki sekalipun perempuan, untuk tetap miskin dan mengalami beban kemiskinan. kemiskinan perempuan dan laki-laki berbeda dan berkontribusi pada kegiatan perkembangan yang berbeda. Perbedaan ini

*Corresponding author.

E-mail address: marseto.ep@upnjatim.ac.id

menggerakkan pentingnya pertimbangan selama menetapkan pengutamaan kebijakan pembangunan, khususnya pengentasan kemiskinan. Menurut Kementerian PPN/Bappenas, kesetaraan gender menguatkan kinerja suatu negara agar bertumbuh, memangkas kemiskinan, dan mengelola secara efektif. Karena itu, kesetaraan gender merupakan komponen penting dari program pembangunan untuk mengangkat seluruh, perempuan maupun laki-laki, keluar dari kemiskinan serta menaikkan taraf hidup. Pembangunan tersebut menawarkan besarnya peluang bagi meningkatkan kesetaraan gender secara berkelanjutan. Keterampilan masyarakat miskin kurang ditekankan karena kebijakan pembangunan yang dilaksanakan selama ini tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam pemerintahan kota. Bagi masyarakat miskin, partisipasi merupakan kesempatan untuk menambah nilai kegiatan pembangunan dan ukuran keberhasilan program pembangunan.

Konsep kesetaraan gender mengacu pada orang-orang yang memiliki masalah, peluang, tanggung jawab, peran dan manfaat pembangunan yang sama. Deklarasi ini didukung oleh Inpres No.2. Ini mengamanatkan pembangunan peka gender ketika merencanakan, merancang, melaksanakan, meninjau dan menguji kebijakan. Disparitas kebutuhan perempuan dan laki-laki selama penyediaan perumahan memfasilitasi pengintegrasian isu gender ketika rencana kebijakan pembangunan, mengingat perlunya partisipasi yang setara dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas hidup dan perumahan. Sebagian dari kesetaraan gender di Indonesia sedang memerankan isu nasional dan wajib disikapi selama kebijakan pembangunan nasional dengan strategi berbasis kesetaraan gender. Semua kelompok dan masyarakat akan mendapat manfaat yang sama dari pembangunan ini.

Di negara berkembang, pertumbuhan ekonomi tersebar merata di seluruh kelompok etnis, wilayah, dan gender. Ketika berbicara tentang pertumbuhan kesetaraan gender, dimensi utamanya adalah kesetaraan gender, dan ketika berbicara tentang dimensi kesetaraan gender, maka kita memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Namun, perbedaan gender masih ada di kalangan perempuan, sebagaimana tercermin dari perbedaan skor IPM dan IPG. perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan.

Table 1. Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Trenggalek

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2017	68,10	91,84
2018	68,71	92,52
2019	69,46	92,74
2020	69,74	92,93
2021	70,06	92,56

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan Tabel 1, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat dari tahun 2017 hingga 2021 mencapai rata-rata sebesar 69,21% dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari tahun 2017 hingga 2021 meningkat dari 91,84% pada tahun 2017 ke tahun 2021, sebesar 92,56 persen pada tahun 2021. Proporsi ini menyoroti kebutuhan akan strategi kesenjangan gender yang masih ada antara perempuan dan laki-laki.

Strategi kesetaraan gender (PUG) diperlukan pada setiap setiap pembangunan, terlebih dalam proses perencanaan dan penyusunan. Hal ini dirancang untuk memperhatikan kepentingan perempuan dan laki-laki sehingga keduanya dapat meraup keuntungan dari hasil pembangunan secara seimbang. Kesetaraan gender bertujuan untuk mengamankan peluang bagi perempuan dan memastikan akses mereka ke proses dan hasil pembangunan. Implementasi kesetaraan gender di era daerah membawa hambatan dan peluang yang lebih besar. Di Indonesia, terdapat peraturan-peraturan hukum terkait tentang PUG sebagai kebijakan demi memasukkan perspektif gender ke internal perencanaan pembangunan. Secara khusus, pengaturan mengenai PUG dituangkan dalam Peraturan Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 berhubungan kesetaraan Gender pada Pembangunan Nasional. Dalam pembangunan nasional Penerbitan arahan presiden ini merupakan tonggak awal pelaksanaan kesetaraan gender di Indonesia. Mengatasi strategi kesetaraan gender sangat penting untuk kebijakan pembangunan perumahan dalam memastikan bahwa disparitas kebutuhan tertangani dan semua penerima bantuan mendapat manfaat dari langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas perumahan (Bradshaw et al. 2017). Perlu diketahui sejauh mana program BSPS mengimplementasikan rancangan yang peka gender terhadap pelaksanaannya yang memperhatikan keinginan laki-laki dan perempuan.

Pembangunan harus dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pelaksanaan pembangunan hanya dapat dilakukan dengan dukungan lingkungan, lingkungan tidak hanya menjadi tempat penyediaan sumber daya bagi pelaksanaan pembangunan tetapi juga penerima bantuan dari akibat pelaksanaan pembangunan. Pada dasarnya, Pembangunan berkelanjutan memerlukan komitmen terhadap pemerataan kebutuhan tata kelola kota yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan harus terpadu dalam hal peningkatan sosial, ekonomi, dan keikutsertaan dalam meningkatkan kualitas lingkungan (Rahman 2016). Perumahan merupakan penyebab yang mempengaruhi keberlanjutan, karena kualitas perumahan yang terjangkau merupakan indikator keberhasilan strategi penanggulangan kemiskinan dan kualitas hidup yang memadai. Rumah tidak layak huni berdasarkan susunan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2016 akan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ialah bantuan pemerintah terhadap masyarakat MBR untuk peningkatan kualitas rumah layak huni melalui gotong royong (Permen PUPR No.7 Tahun 2022). Salah satu jalan dalam mengatasi masalah rumah tidak layak huni adalah dengan mencapai target kesebelas Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu menggambarkan kota dan lingkungan yang menyeluruh, damai, tangguh, serta berkelanjutan. Peningkatan angka harapan hidup merupakan faktor penting dalam keberhasilan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk pengambilan keputusan partisipatif yang mempertimbangkan kesetaraan gender. Berbagai SDGs bertujuan untuk memastikan tidak ada seorang pun, termasuk perempuan, yang tertinggal. Secara khusus, tujuannya terkait erat dengan kualitas hidup perempuan, memetakan kehidupan yang kondusif beserta membantu kesejahteraan

akan seluruh kelompok di segala usia, serta pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan memastikan partisipasi penuh kesempatan yang sama bagi perempuan.

Pengembangan kualitas hidup dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan merupakan cara untuk meningkatkan good governance. Hal ini dilakukan berusaha mengambil keputusan yang penuh melewati partisipasi masyarakat, terutama masyarakat marginal dan miskin. Pembangunan perkotaan dapat menyeluruh dan berkelanjutan harus menanggulangi beberapa kendala pembangunan, termasuk penyelesaian konflik yang timbul ketika keputusan diambil untuk merehabilitasi, membangun kembali atau menghancurkan lingkungan yang kumuh. Menurut Jiboye (2011), yang tidak dapat dihuni muncul sebagai akibat dari ledakan penduduk di perkotaan akibat kemiskinan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai maksud dari pembahasan kemiskinan, melalui upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dilakukan menggunakan pengambilan keputusan secara partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat terlebih kelompok marjinal dan masyarakat miskin dalam meluaskan, membangun kembali, atau pembongkaran permukiman kumuh (Belsky 2012). Oleh sebab itu, perlunya akses kepada masyarakat harus terbuka agar mereka dapat berpartisipasi pada proses kegiatan pembangunan, terkait peningkatan perumahan dan kualitas hidup dalam program BSPS.

Namun, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diharapkan mampu meningkatkan perumahan dan kualitas hidup menjadi solusi berkualitas tinggi yang akan mengarah pada pemukiman yang sehat. Mempertahankan lokasi rumah yang ada berarti memastikan mata pencaharian masyarakat miskin, karena kegiatan produktif yang terkait dengan kegiatan peningkatan pendapatan rumah tangga terjamin. Kepedulian MBR selanjutnya adalah berusaha secara bertahap memperbaiki kondisi fisik perumahan melalui sarana swadaya sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan hibah revitalisasi untuk memperbaiki kondisi rumah MBR. Tujuan tersebut sejalan pada Master Plan Indonesia Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan (MP3KI) 2012 yang bertujuan untuk meminimalisir lingkungan kumuh di kota-kota Indonesia, terutama Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan Kementerian PUPR (2019), pembangunan harus tanggap gender dilaksanakan dengan prinsip bahwa gender tidak memisahkan laki-laki dan perempuan, tetapi melaksanakan infrastruktur yang memenuhi kebutuhan spesifik, dengan mempertimbangkan strategi berbasis gender, termasuk akses, manfaat, kontrol dan partisipasi. Kajian sebelumnya oleh Kasmawat, Murdiansyah Herman, dan Fika Fibriyanita (2020) menemukan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan swadaya (BSPS) yaitu kurangnya interaksi dengan masyarakat terkait swadaya. Program Bantuan Stimulan Perumahan (BSPS) masih jauh dari harapan. Kendala ini menjadi kendala bagi masyarakat penerima manfaat mengingat sarana yang dibutuhkan untuk memperbaiki rumah membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan pengerjaan perbaikan tiap rumah tidak sama dilihat dari tingkat kerusakan yang berbeda. Persoalan terkait ketersediaan dan partisipasi penerima manfaat, terutama terkait selisih harga material bangunan dengan rencana anggaran belanja (RAB), juga merugikan. Senada dengan penelitian Agnes S. Djakas (2010) yang menunjukkan perlunya orientasi gender dalam hal pengakuan partisipasi dan peran perempuan dalam sektor rumah tangga. Melihat pembagian waktu, laki-laki bekerja lebih baik ketika mereka memiliki lebih banyak waktu luang. Pada saat yang sama, studi oleh

Esarit, Haulahi dan Sunart (2019) menemukan strategi kesetaraan gender harus memastikan tata kelola yang baik, sehingga peningkatan mutu dan kualitas perumahan yang berkelanjutan dapat diukur secara bertahap. Ringkasnya, beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti aspek-aspek yang menjadi penyebab ketidakefektifan program BSPS, sementara penelitian ini berfokus membahas peran kesetaraan gender dalam pelaksanaan program BSPS di desa Jombok, kecamatan Pule, kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan uraian di atas bahwa persoalan utamanya ada pada pengintegrasian kesetaraan gender ke dalam program BSPS. Kurangnya pengakuan atas perbedaan, perlunya partisipasi, dan tidak adanya kesempatan yang sama untuk memetik manfaat dari program-program pembangunan membuat BSPS dalam melaksanakan kesetaraan gender. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 4 (empat) strategi utama kesetaraan gender: akses, akses, manfaat, kontrol dan partisipasi.

Hal tersebut penting untuk diketahui, karena program BSPS di Desa Jombok Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek membutuhkan penelitian tentang integrasi gender. Sebanyak 20 unit rumah tidak layak huni mengingat bahwa Desa Jombok, Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu desa PKE pada Program BSPS di Kabupaten Trenggalek dan program BSPS baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2016, Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk judul “Peran Kesetaraan Gender Terhadap upaya peningkatan kualitas hunian dan kualitas hidup dalam program bantuan stimulan perumahan Swadaya (BSPS)”

Bedasarkan penjelasan diatas latar belakang yang dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut,

1. Bagaimana proses Pelaksanaan Program Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Jombok?
2. Bagaimana peran Kesetaraan Gender (PUG) dalam Kegiatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian artikel ini. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami secara komprehensif fenomena yang dialami subjek, seperti tingkah laku, observasi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada berdasarkan data.

Kajian ini dilakukan untuk memfokuskan pada salah satu isu yang diangkat dengan menganalisis peran gender dalam peningkatan kualitas rumah dan angka harapan hidup pada Program Bantuan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Jombok Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada berdasarkan data. (Nazir, 2013).

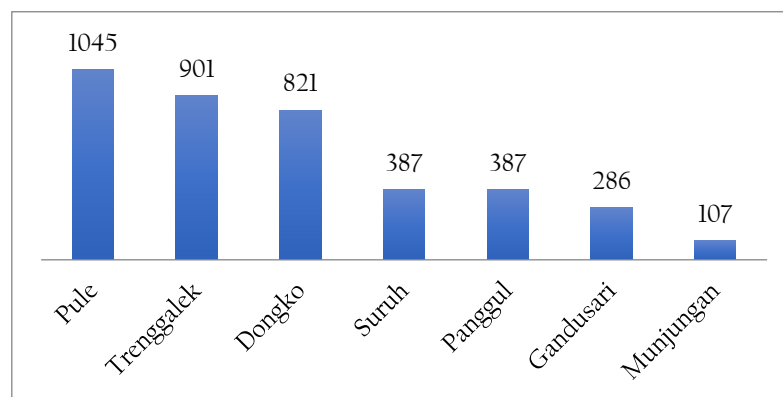
Metode ini menggunakan teknik yang menggabungkan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Metode pengumpulan data pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) observasi langsung ke lapangan yang diselidiki, ada rekaman kondisi atau perilaku warga sasaran (2) wawancara, atau tanya jawab. kepada informan berdasarkan subjek (3) Studi kepustakaan, yaitu. membaca dan mengutip berbagai jurnal dan ahli atau pendapat para ahli (4) Dokumentasi adalah analisis dan ringkasan bahan tertulis, baik itu konten visual atau elektronik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Program Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Jombok, Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.

Hasil Keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat dengan jumlah rumah tidak layak huni kemungkinan akan bertambah karena terbatasnya kemampuan keuangan masyarakat untuk membangun rumah mandiri. Program swadaya perumahan pemerintah merupakan salah satu inisiatif yang ditujukan untuk mencegah permasalahan perumahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terkait masalah tersebut, Kementerian PUPR menyampaikan pada Surat Edaran Direktur Penyediaan Perumahan Nomor 07/SE/Dr/2018 bahwa negara berkewajiban menjaga seluruh penduduk di Indonesia dengan menyediakan rumah. Kawasan pemukiman dimana masyarakat dapat tinggal di perumahan yang mewadai dan terjangkau dalam lingkungan sehat dan aman (Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan BSPS, 2018). Kesempatan untuk mendapatkan rumah layak huni serta harga terjangkau untuk masyarakat yang daya belinya terbatas dengan dukungan swadaya pemerintah kota. Kemandirian sebagai masalah yang krusial dalam penyelenggaraan program ini, lantaran mampu mempengaruhi berhasil atau tidaknya kegiatan rumah layak huni.

Grafik 1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di 5 Kecamatan Terpilih Penyaluran BSPS, Kabupaten Trenggalek



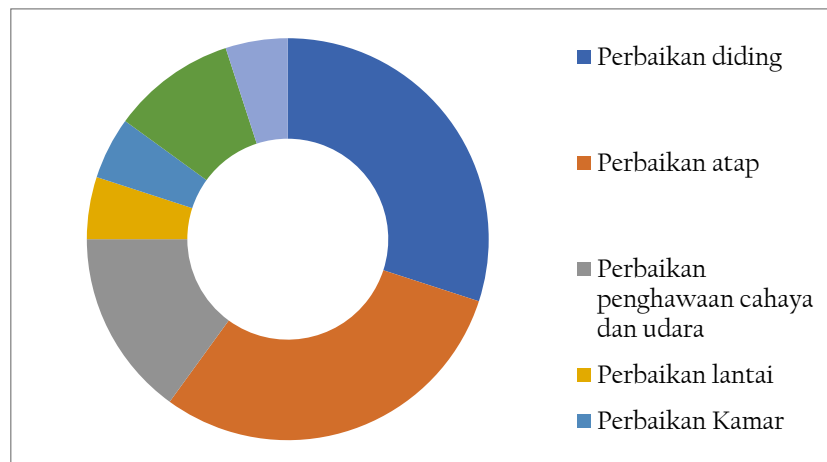
Sumber: Data Sektoral Kabupaten Trenggalek, 2021

Pada tahun 2021, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya akan dilaksanakan di salah satu wilayah terpilih Kabupaten Trenggalek yaitu Desa Jombok, Kecamatan Pule, salah satu desa yang mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dengan jumlah skor tertinggi dalam SK T-1. Dukungan program BSPS bukan untuk membangun rumah swadaya (PBRs) baru, melainkan untuk meningkatkan kualitas rumah swadaya (PKRS) dengan memperbaiki rumah tidak layak huni agar layak huni. Bangunan tetap sesuai struktur hunian, kesehatan penghuni, akses penerangan dan sanitasi serta luas bangunan yang cukup minimal 36M². Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Jombok Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek yang telah diteridentifikasi serta memenuhi kriteria penerima bantuan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati No. 429 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Bupati No. 166 Tahun 2020 terkait Penetapan Penerima Bantuan (BSPS) berupa uang dalam Kegiatan meningkatkan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Desa Jombok Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek.

Pengalokasian dana bantuan stimulan setiap satu penerima bantuan sebanyak Rp. 20 juta dirinci menjadi dana bahan baku material bangunan dan upah tenaga kerja, masing-masing sebesar Rp17.5 juta dan Rp2.5 juta. Perbaikan kualitas rumah terlaksana tergantung dari kesanggupan dana swadaya yang dimiliki oleh para penerima bantuan. Peningkatan kualitas rumah berfokus akan kondisi atap, dinding, lantai, ventilasi pencahayaan dan penghawaan serta perombakan pada ruang tertentu, seperti kamar mandi, dapur dan kamar tidur.

Memilih kualitas dan harga bahan bangunan dapat membantu meningkatkan kualitas rumah dan membuatnya bertahan lebih lama. Penerima bantuan biasanya memilih bahan dengan mempertimbangkan harga yang lebih murah. Pemilihan material sebenarnya berbeda dengan pernyataan Moksnes dan Melin (2014) bahwa dalam meningkatkan kualitas fisik ruang hunian di permukiman kumuh harus memperhatikan kategori material bangunan yang digunakan. Hal ini mempengaruhi keamanan dan kesehatan rumah, terutama di daerah kumuh yang lebih padat penduduknya. Adanya perbaikan kondisi fisik seperti Dinding rumah yang melemah seluruhnya diganti dengan batu bata baru yaitu, satu bata merah atau beberapa bata merek lain. Sebelumnya lantainya masih kotor, namun setelah diperbaiki sebagian besar tertutup campuran semen. Jendela direstorasi dengan berbagai cara, seperti memperbanyak total jendela, mengubah posisi jendela, atau menggantinya serupa kayu baru. Beberapa penerima bantuan telah memutuskan untuk penambahan jumlah pintu, ventilasi, kamar mandi maupun kamar tidur yang sebelumnya tidak ada di rumah tersebut.

Gambar 1. Daftar Perbaikan Rumah



Sumber: Data Proposal Penerima Bantuan Desa Jombok Kab.Trenggalek

Hal tersebut, dilakukan serta dipastikan dengan pengamatan lapangan dan verifikasi tindakan yang dilakukan sebelum dan sesudah menerima bantuan program BSPS. Selama masa pengamatan sekitar 3-4 bulan, ditemukan bahwa detail bentuk renovasi rumah sesuai dengan Gambar 1 dan Gambar 2. Seperti yang diketahui oleh Parsell (2012), rumah ideal ialah tempat pertumbuhan dan perkembangan keluarga dan rumah yang baik ialah memenuhi persyaratan kesehatan maupun keselamatan menjamin kehidupan dan kualitas anggota keluarga yang tinggal di dalamnya. Hal ini diperkuat dengan pendapat beatriks novianti dan indra yohanes (2017) bahwa lingkungan rumah memegang peranan penting pada peningkatan kualitas hidup sebagai keluarga. Oleh karena itu, pengamatan menunjukkan bahwa bantuan program BSPS menguntungkan penerima dengan meningkatkan kualitas hidup keluarganya, yang secara tidak langsung mengangkat mereka dari kemiskinan.

2. Peran Kesetaraan Gender (PUG) dalam Kegiatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Kesetaraan Gender (PUG) ialah pendekatan logis dan terstruktur akan mencapai kesetaraan dalam keadilan gender segala aspek kehidupan manusia melintasi kebijakan dan program yang menjawab pengetahuan, keinginan, keinginan, dan tantangan perempuan serta laki-laki pada pemberdayaan perempuan dan dalam semua fase perencanaan. Persiapan, pelaksanaan, mentoring, evaluasi kebijakan, program dan aksi di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah. Perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki pada penelitian ini terkait dengan penyediaan rumah.

Grafik I. Presentase Gender dalam Penerima Bantuan Program BSPS



Sumber: Data Proposal Penerima Bantuan Desa Jombok Kab.Trenggalek

Melalui program BSPS ini, perempuan mendapatkan jatah proporsi yang lebih rendah dari pada kaum laki-laki disebabkan karena ketidakpercayaan pengawas pada perempuan akan pembangunan rumah.

Program Bantuan BSPS adalah program yang dijalankan pemerintah melalui Kementerian PUPR untuk mengentaskan kemiskinan dengan merehabilitasi rumah tidak layak huni. Sasaran utamanya adalah permukiman informal yang kondisi tempat tinggalnya tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan bangunan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Moksnes dan Melin (2014) bahwa perencanaan, pembiayaan dan bersama-sama mengimplementasikan kualitas hidup meningkat, pendekatan baru dalam pembangunan perkotaan dilaksanakan dengan melibatkan penghuni kualitas hidup informal. Program BSPS pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2016. Pelaksanaan program BSPS dibagi menjadi tiga aktivitas primera: peningkatan kualitas, pembangunan baru dan pembangunan infrastruktur, ruang dan infrastruktur publik. Namun sifat kegiatan BSPS di Kabupaten Trenggalek adalah peningkatan kualitas. Selain bentuk aktivitas, pelaksanaan program BSPS juga dilakukan dalam tahap pendampingan yang melibatkan masyarakat dan tim teknis. Tahap pendampingan dari perencanaan, pengoprasian, pemantauan dan pemberitauan berlanjut hingga pasca kegiatan. Intensi dari kegiatan pendampingan adalah mempersiapkan masyarakat untuk mengikuti program tersebut.

Ada 4 aspek kriteria yang digunakan sebagai kunci keberhasilan penerapan aspek terkait gender, yaitu:

- Akses

Kebijakan terhadap kemiskinan dan pembangunan yang memungkinkan perempuan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan perlu memahami kesetaraan gender. Sejalan dengan deklarasi tercatat, dilaksanakan program BSPS untuk membagikan kesempatan kepada perempuan bagi mengikuti kegiatan pendampingan. Pendekatan ini setelah dianalisis dengan menggunakan dua standard yaitu keahlian mengungkapkan pandangan dan kemampuan berpartisipasi dalam

aktivitas pelatihan (Puspitawati 2013). Kriteria (1) adalah kemampuan untuk menentukan apakah rumah tangga penerima memiliki ide atau visi untuk menentukan rumah mana yang dapat diperbaiki. Selain itu, rumah tangga penerima tidak memiliki kendali atas pemakaian dana tersebut. Pengelolaan dana didelegasikan kepada Fasilitator Lapangan (TFL), yang memungkinkan penerima manfaat untuk memilih opsi pendanaan. Kriteria (2) adalah keikutsertaan penerima manfaat dalam kegiatan pengembangan program BSPS yang dilakukan sama pemerintah/tim teknis, dan penerima manfaat hendaklah mengikuti aktivitas pendampingan, kecuali guna yang berhalangan karena hal-hal sebagai berikut: lansia, sakit, imigrasi, dan lainnya. Standar ini telah dipenuhi berdasarkan peraturan yang ada.

- **Manfaat**

Manfaat dianalisis berdasarkan perubahan yang dialami secara pribadi oleh masing-masing penerima bantuan dan perubahan keadaan. Ada satu kriteria di sisi keuntungan. Penerima bantuan perumahan dapat menikmati manfaat mulai pelaksanaan program BSPS. Hasil penelitian menunjukkan manfaat seperti hubungan yang lebih baik dan partisipasi yang lebih aktif dalam kegiatan lingkungan bagi penerima manfaat individu. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan dan peran individu dikembangkan di lingkungan rumah.

Menurut Czischke (2018), persepsi perubahan dipengaruhi oleh kemampuan fasilitator untuk memahami situasi yang berbeda dari penerima manfaat saat ini. Ini menentukan bagaimana orang miskin (MBR) akan melakukan penilaian kebutuhan. Keunggulan lainnya adalah terjalinnya hubungan yang erat antara penerima bantuan, pekerja, pemilik toko bangunan dan fasilitator. Proses komunikasi, membangun jaringan dan memahami aturan bersama merupakan sumber daya sosial yang penting bagi prosedur pemberdayaan masyarakat miskin (Babaei, Ahmad dan Gil 2012).

- **Kontrol**

Dalam hal aspek kontrol, ada dua kriteria: (1) kemampuan untuk memutuskan penggunaan dana (swasembada) dan (2) kemampuan untuk memutuskan di mana renovasi rumah diperlukan. Keputusan penggunaan dana tidak langsung berada di tangan penerima uang, tetapi ditangani oleh tenaga fasilitator lapangan sedemikian rupa sehingga pemberi dana menyerahkan daftar kebutuhan bahan bangunan dan menyerahkannya kepada toko bangunan yang dipilih. Penerima bantuan memutuskan bagian rumah mana yang akan diperbaiki. Keputusan ini biasanya dibuat sebagai hasil pertimbangan pribadi atau pasangan dan anggota keluarga lainnya. Verifikasi keputusan yang diukur adalah bukti pemenuhan misi, yang menggambarkan kemampuan untuk bertindak atas nama penerima bantuan. Pemberdayaan pada tingkat individu menyiratkan campur tangan aktif dalam diskusi, menyampaikan gagasan dan membawa transisi yang diinginkan. Salah satu contohnya adalah karena ketergantungan perempuan pada laki-laki atau keluarga besar untuk membuat keputusan, maka perempuan tidak ditanya mengenai kebutuhannya.

- Partisipasi

Berpartisipasi ketika proses pembangunan mampu meningkatkan kesadaran terhadap apa yang benar-benar diinginkan, membantu menetapkan prioritas dan meningkatkan komitmen untuk perbaikan. Menurut program BSPS, ada tiga kriteria: Partisipasi dalam penyebaran informasi, kemudahan akses informasi dan kemampuan bertindak mandiri. Kriteria (1) Rumah tangga penerima bantuan menunjukkan tidak mengikuti sosialisasi karena kurang memahami program yang sementara berjalan. Kriteria (2) menunjukkan bahwa laporan tersebut berasal langsung dari pemberitahuan resmi tim teknis atas pengaduan tersebut. Kriteria (3) Kegiatan tidak dilakukan secara mandiri, karena banyak penerima bantaun yang tidak dapat melakukan kegiatan sendiri sehingga membutuhkan bantuan pendamping fasilitator lapangan. Contohnya adalah dalam pelaksanaan pembangunan, hanya laki-laki saja yang dilibatkan sehingga hasil pembangunan kurang memperhatikan kebutuhan perempuan. Padahal dalam keseharian,

Berdasarkan 4 (empat) kriteria untuk mengukur keberhasilan implementasi keempat aspek gender tersebut, disimpulkan bahwa program BSPS telah cukup mengimplementasikan keempat aspek gender dalam praktiknya. Aspek yang tercapai diimplementasikan dalam pelaksanaan program BSPS ada dua yaitu aspek manfaat dan aspek kontrol. Aspek (1) Nilai aspek manfaat diperoleh karena sebagian besar penerima bantuan merasakan manfaat, yaitu relasi dari berbagai kelurahan, hal ini ditunjukkan pada individu telah meningkatkan keterampilan komunikasi, lebih mampu membangun hubungan, dan berpartisipasi ketika aktivitas lingkungan. (2) Aspek yang memenangi merupakan kontrol rumah tangga saat menyongsong keputusan terkait bagian-bagian rumah perlu diperbaiki. Aspek ini menunjukkan bahwa rumah tangga memiliki pengaruh yang kuat tidak hanya pada pengetahuan tentang pertimbangan memperbaiki komponen tertentu dari rumah, tetapi juga pada pengambilan keputusan.

Penerapan perspektif gender berhasil diintegrasikan melalui kesamaan peran rumah tangga penerima manfaat, terutama melalui aspek manfaat dan pengawasan. Pertumbuhan kapasitas individu ditunjukkan dengan berkembangnya kesadaran kekeluargaan, yang merupakan hasil dari terciptanya hubungan kolektif antara penerima manfaat. Hal ini memperkuat interaksi antara prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan dengan penjangkaran pemerataan dan pembangunan perkotaan yang inklusif.

D. SIMPULAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi negara. Salah satu faktor penyebabnya adalah kesenjangan gender yang masih banyak ditemukan di lingkungan sekitar. Padahal hak dan kewajiban setiap individu dijamin oleh negara. Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pemerintah berupaya mendorong pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program ini dijalankan pemerintah melalui Kementerian PUPR untuk mengentaskan kemiskinan

dengan merehabilitasi rumah tidak layak huni. Pelaksanaan program swasembada ini tidak lepas dengan adanya kesetaraan gender. Setiap individu berhak berkontribusi dalam menyukseskan program rehabilitasi rumah tidak layak tersebut, tanpa membedakan status gender antar individu.

Program BSPS pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2016. Program ini diluncurkan sebagai bagian dari peningkatan kualitas, pembangunan baru dan pembangunan infrastruktur, sarana dan fasilitas umum. Program inilah yang menjadi sasaran utama dalam mendongkrak adanya perbaikan taraf hidup masyarakat. Selain itu dalam pelaksanaan program juga berhasil membuktikan bahwasanya setiap individu berhak untuk berpartisipasi dalam sebuah kegiatan tanpa melihat status gender. Berdasarkan data yang terkumpul dari penelitian dapat disimpulkan bahwa peran kesetaraan gender dalam upaya peningkatan kualitas hunian dan kualitas hidup hidup sangat baik diimplementasikan dalam Program Bantuan Perumahan Swadaya (BSPS) di Trenggalek. Empat aspek kunci keberhasilan kesetaraan gender yaitu akses, manfaat, kontrol, dan partisipasi telah terpenuhi. Artinya keberhasilan penerapan aspek gender ini mampu berdampak pada peningkatan kapasitas penerima manfaat individu rumah tangga penerima.

Adanya kesetaraan gender dalam proses kegiatan perbaikan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni ini diharapkan mampu memperbaiki taraf hidup masyarakat sekitar. Melalui ide dan gubahan pemikiran oleh setiap individu akan mampu menciptakan keadaan ekonomi sekitar yang lebih baik. Sehingga pada akhirnya kesetaraan gender inilah yang akan meningkatkan kualitas hunian dan kualitas hidup perempuan di Desa Jombok, Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.

REFERENSI

- [Permen PUPR]. 2016. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- Bappenas. 2012. Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender.
- Jiboye, Adesoji David. 2011. "Achieving Sustainable Housing Development in Nigeria: A Critical Challenge to Governance." *International Journal of Humanities and Social Science* 1 (9): 121–27.
- Gwaleba, Method J., dan Fahria Masum. 2018. "Participation of Informal Settlers in Participatory Land Use Planning Project in Pursuit of Tenure Security." *Urban Forum* 29 (2): 169–84.
- Babaei, belHamidreza, Nobaya Ahmad, dan Sarjit S. Gill. 2012. "Bonding, Bridging and Linking Social Capital and Empowerment Among Squatter Settlements in Tehran, Iran." *World Applied Sciences Journal* 17 (1): 119–26.
- Belsky, Eric S. 2012. "Planning for Inclusive and Sustainable Urban Development." *State of the World 2012: Moving Toward Sustainable Prosperity*, 38–52.
- Bradshaw, Sarah, Sylvia Chant, dan Brian Linneker. 2017. "Gender and Poverty: What We Know, Don't Know, and Need to Know for Agenda 2030." *Gender, Place and Culture* 24 (12): 1667–88.

- Setyowati, T. L., & Arsanti, T. A. (2015). Perempuan dan jabatan manajerial dalam organisasi : WFC pada perempuan bekerja. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin dan Call for Papers, Universitas Stikubank Semarang, <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendiu/article/view/3304/911>
- Siscawati Mia. 2015. Panduan Pengarusutamaan Gender dalam Siklus Pengelolaan Program. Jakarta : Forest Governance Program Phase 2 (FGP 2) Kemitraan
- Badri, dalam jurnal berjudul “pembangunan hukum perspektif gender melalui kesetaraan hak, sumber daya dan aspirasi, Jurnal Justisia, Vol 2 No 1 2017 Dede Kania, dalam jurnal berjudul “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations”, Jurnal Konstitusi, Volume 12, No 4 Desember 2015
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2007. Program Pembinaan Jarak Jauh Pengarusutamaan Gender, Modul 2 : Konsep dan Teori Gender. Jakarta : Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan, BKKBN.
- Puspitawati, H. (2013). Konsep, Teori dan Analisis Gender. FEMA-IPB : Bogor Sri Mastuti, Model Alternatif Penerapan Anggaran Responsif Gender. Dalam Jurnal Perempuan (Maret 2006, Edisi 46), Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, Hlm. 9.
- Parsell, Cameron. 2012. “Home is Where the House is: The Meaning of Home for People Sleeping Rough.” *Housing Studies* 27 (2): 159–73.
- Sugarda, Chandra. 2012. Penyusunan Gender Analysis Pathway (Gap) Gender Budget Statement (Gbs).
- Suhaeti, Rita Nur dan Edi Basuno. 2006. “Integrasi Gender dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat Pesisir.” *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 6 (1): 1–23.
- Zulkarnain. 2016. “Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Parigi Selatan.” *Katalogis* 4 (10): 179–88.